



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI SUARDI**
2. Jabatan : **PANITERA PENGGANTI**
3. NHK : **552092**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/36 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 15.000.000
3. Tanah Seluas 177 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
5. Tanah Seluas 100 m2 di KAB / KOTA BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 10.000.000
6. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA BONE, HIBAH TANPA AKTA Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PAREPARE , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
8. Tanah Seluas 112 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
9. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA BANTAENG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/157 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 805.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 133.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU SIGRA 1200 CC Tahun 2018, HASIL SENDIRI

Rp. 110.000.000

2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI

Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 859.767.961

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.767.767.961

III. HUTANG

Rp. 795.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.972.267.961

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.